

**PERBEDAAN RASIO KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH  
OTONOMI DAERAH**

**(Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Jurusan Akuntansi**



**Diajukan Oleh:**

**Endah K. Setiawati**

**0613010050/FE/EA**

**Kepada**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR**

**2010**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas penyusunan usulan penelitian yang berjudul : **“Perbedaan Rasio Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung) “**, dapat terselesaikan dengan lancar.

Adapun maksud penyusunan usulan penelitian ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Tentunya dalam proses penulisan usulan penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam hal ini secara khusus peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Saiful Anwar, Msi selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, Msi selaku Ketua Progdi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Prof. Dr. H. Soeparlan Pranoto, MM, AK selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis demi sempurnanya penyusunan usulan penelitian ini.
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya segenap Dosen Jurusan Akuntansi yang telah membekali peneliti pengetahuan-pengetahuan yang sangat berguna dan berharga.
7. Kepala BPS Kab. Tulungagung, Kepala DPPKAD Kab. Tulungagung, Kepala BAPPEDA Kab. Tulungagung dan seluruh staf serta karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian serta memberikan keterangan dan data yang berkenaan dengan usulan penelitian ini.
8. Secara khusus dengan rasa hormat menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayah dan Ibu beserta seluruh anggota keluarga besarku yang telah memberikan banyak dorongan, semangat serta doa restu, baik secara moril maupun materiil.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan usulan penelitian ini.

Semoga ALLAH SWT selalu melindungi, memberikan balasan segala kebaikan atas semua bantuan kepada peneliti.

Akhir kata semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya, Maret 2010

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II    KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN MODEL .....</b>	<b>8</b>
2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terakhir .....	8
2.2. Kajian Teori .....	14
2.2.1. Anggaran .....	14
2.2.1.1. Pengertian Anggaran .....	14
2.2.1.2. Fungsi dan Tipe Anggaran .....	14
2.2.1.3. Pedoman dan Penyusunan Anggaran .....	16
2.2.1.4. Siklus Anggaran .....	18

2.2.2. Anggaran Kinerja .....	20
2.2.2.1. Pengertian Anggaran Kinerja .....	20
2.2.2.2. Mekanisme Perencanaan Anggaran Daerah .....	20
2.2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	21
2.2.3.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	21
2.2.3.2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	22
2.2.4. Keuangan Daerah .....	31
2.2.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah .....	31
2.2.4.2. Undang-Undang Pelaksanaan Keuangan Daerah .....	32
2.2.5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	35
2.2.5.1. Pengertian Kinerja Keuangan .....	35
2.2.5.2. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	36
2.2.6. Kinerja Keuangan Daerah .....	39
2.2.7. Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	41
2.2.7.1. Jenis Analisis Rasio Keuangan .....	41



3.3.1. Jenis Data .....	60
3.3.2. Pengumpulan Data .....	61
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis .....	62
3.4.1. Uji Normalitas .....	62
3.4.2. Teknik Analisis <i>Paired Sample T-Test</i> .....	62
3.4.3. Uji Hipotesis .....	63
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
4.1. Deskriptif Objek Penelitian .....	65
4.1.1. Keadaan Geografis Kota Tulungagung .....	65
4.1.2. Pemerintahan .....	65
4.1.3. Penduduk .....	66
4.1.4. Tenaga Kerja.....	66
4.1.5. Pertanian .....	67
4.1.6. Peternakan .....	67
4.1.7. Pendidikan .....	68
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	68
4.2.1. Rasio Kemandirian .....	68
4.2.2. Rasio Aktifitas .....	70
4.2.3. Rasio Pertumbuhan.....	73
4.3. Analisis dan Uji Hipotesis .....	74
4.3.1. Uji Normalitas .....	74
4.3.2. Analisis <i>Paired Sample t Test</i> (Uji Beda Rata-Rata Untuk Dua Sampel Berpasangan).....	75



4.3.2.1. Perbedaan Rasio Kemandirian Sebelum dan Sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja .....	76
4.3.2.2. Perbedaan Rasio Aktivitas Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	77
4.3.2.3. Perbedaan Rasio Pertumbuhan Sebelum dan Sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja .....	80
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian .....	81
4.4.1. Implikasi Hasil Penelitian.....	81
4.4.2. Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu.....	83
4.4.3. Keterbatasan Penelitian .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>85</b>
5.1. Kesimpulan .....	85
5.2. Saran .....	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	24
Gambar 2.2 : Laporan Surplus atau Defisit Anggaran.....	41
Gambar 2.3 :Kerangka Pikir .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	:	Data Rasio Kemandirian Sebelum Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	69
Tabel 4.2	:	Data Rasio Kemandirian Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	69
Tabel 4.3	:	Data Rasio Belanja Rutin Sebelum Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	70
Tabel 4.4	:	Data Rasio Belanja Rutin Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	71
Tabel 4.5	:	Data Rasio Belanja Pembangunan Sebelum Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	72
Tabel 4.6	:	Data Rasio Belanja Pembangunan Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	72
Tabel 4.7	:	Data Rasio Pertumbuhan Sebelum Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	73
Tabel 4.8	:	Data Rasio Pertumbuhan Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	74
Tabel 4.9	:	Hasil Uji Normalitas.....	75
Tabel 4.10	:	Hasil Uji t Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan .....	79
Tabel 4.11	:	Rangkuman Penelitian Terdahulu .....	83

**ANALISIS PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS  
KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung)**

**Oleh  
Endah K. Setiawati**

**ABSTRAK**

Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Tulungagung sebelum dan sesudah otonomi pasti mengalami perbedaan, karena sebelum otonomi kekayaan daerah Kota Tulungagung dikelola atau diatur oleh pemerintah sedangkan setelah terjadi otonomi daerah secara otomatis kekayaan daerah Kota Tulungagung diatur sendiri. Tujuan untuk menemukan bukti empiris perbedaan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, untuk menemukan bukti empiris perbedaan tingkat Aktifitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, dan untuk menentukan bukti empiris perbedaan tingkat Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tulungagung di Propinsi Jawa Timur sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja sedangkan sampelnya menggunakan laporan keuangan daerah Tingkat II Kota Tulungagung yaitu tahun anggaran 1998/1999 sampai 2003/2004 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk menjawab perumusan, tujuan dan hipotesis penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis *Paired Sample t Test*.

Berdasarkan hasil analisis *Paired Sample t Test*, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam bentuk kemandirian keuangan daerah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam bentuk aktivitas keuangan daerah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja dan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam bentuk pertumbuhan keuangan daerah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.

**Kata kunci :** *Rasio Aktivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan*

**ANALYSIS OF PERFORMANCE-BASED BUDGET ENTRY INTO EFFECT  
ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE  
(Case Study On Local Government District Tulungagung)**

By  
Endah K. Setiawati

**ABSTRACT**

Budget performance is basically a system of local budget preparation and management-oriented results or performance achievements. Tulungagung City Government financial performance before and after decentralization must be having a difference, because before the autonomy of regional wealth Tulungagung City managed or regulated by the government while regional autonomy after the property is automatically set itself Tulungagung City area. Aim to find empirical evidence of differences in the level of financial independence Tulungagung District Government between before and after application of performance-based budget, to find empirical evidence of differences in activity levels of PAD District Government Tulungagung between before and after application of performance-based budget, and to determine differences in the level of empirical evidence local government revenue growth of this tourism between before and after application of performance-based budget

The population of this study is the overall financial statement Municipal Tulungagung in East Java province before and after the introduction of performance-based budget while the sample using the second level of local government financial reports Tulungagung City is the fiscal year 1998/1999 to 2003/2004 using the purposive sampling technique. To answer the formulation, research objectives and hypotheses used in the analysis is the analysis of Paired Sample t Test.

Based on analysis of Paired Sample t Test, we can conclude that there is no difference in financial performance Tulungagung District Government in the form of regional financial independence between before and after the introduction of performance-based budgets, there was no difference in financial performance Tulungagung District Government in the form of regional financial activity between before and after the introduction of performance-based budget and there was no difference in financial performance Tulungagung District Government in the form of financial growth in the region between before and after the introduction of performance-based budget.

**Keywords:** Activity ratio, ratio of Independence, Growth Ratio

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan system pemerintahan desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya Otonomi Daerah (Otda) adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Selain itu keadaan luar negeri yang juga menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya.

Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui Otda (Halim 2001:2). Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi

kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. (Bastian 2006).

Adapun misi utama undang-undang nomor 22 tahun 1999 jo undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 jo undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan, untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian 2001:6). Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Soedjono 2000).

Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Seperti yang diungkapkan Soedjono (2000) dalam penelitiannya dengan objek penelitian pemerintah kota Surabaya bahwa

sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kemudian, saat ini keluar peraturan baru yaitu PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002.

Reformasi anggaran tersebut, dalam proses penyusunan APBD diharapkan menjadi lebih partisipatif. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan



Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pasal 17 ayat 2, yaitu dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasioanal dibidang keuangan daerah.

Sejalan dengan yang diamanatkan dalam undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat (Abimanyu 2005).

Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai, untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mariana 2005), tetapi dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tersebut masih banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitan karena kurangnya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa belanja aparatur lebih tinggi dibandingkan dengan belanja publik

(Roesman dan Dendis 2005). Dan pada tahun 2006 Permendagri 13/2006 sudah akan mulai efektif dilaksanakan.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Tulungagung sebelum dan sesudah otonomi pasti mengalami perbedaan, karena sebelum otonomi kekayaan daerah Kota Tulungagung dikelola atau diatur oleh pemerintah sedangkan setelah terjadi otonomi daerah secara otomatis kekayaan daerah Kota Tulungagung diatur sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan **“Perbedaan Rasio Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung) “**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat Aktifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja?

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja
2. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan tingkat Aktifitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja
3. Untuk menentukan bukti empiris perbedaan tingkat Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Untuk menemukan bukti empiris tentang perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.

3. Bagi Akademisi

- a. Memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain yang terkait.
- b. Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- c. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JATIM dengan dunia kerja.